

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Liberalisasi perdagangan merupakan salah satu tujuan organisasi internasional yaitu *World Trade Organization*. Sektor pertanian merupakan salah satu bidang yang menjadi aspek komoditi perdagangan bebas atau liberalisasi dan juga diatur dalam ketentuan WTO, sektor pertanian tersebut masuk dalam kategori perdagangan jenis barang yaitu *the General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Perjanjian khusus yang mengatur di sektor pertanian dan kebutuhan pangan yaitu *Agreement on Agriculture* (AoA).

Indonesia meratifikasi perjanjian AoA sejak tahun 1995. Mulai saat itu juga Indonesia sudah membuka pintu impor yang seluas-luasnya salah satu adalah beras. Akibat dari Indonesia meratifikasi AoA menyebabkan hambatan tarif dan non tarif dikurangi bahkan dihilangkan dengan kata lain barang impor dari negara lain tidak dikenakan pajak yang berat, subsidi di sektor pertanian dicabut, dan subsidi ekspor pun dikurangi. Ketika terjadinya liberalisasi di sektor pertanian menimbulkan persaingan secara kompetitif antara beras domestik dengan beras impor selain itu kinerja petani tidak disubsidi oleh negara. Maka dampak dari itu semua berakibat produktivitas petani untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik menjadi merosot tajam. Makin banyaknya beras impor di dalam negeri sehingga mengakibatkan petani-petani dalam negeri mengalami gulung tikar. Untuk menanggulangi petani-petani dalam negeri yang mengalami gulung tikar

dan menghindari ketergantungan dari negara lain maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 12/M-DAG/Per/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras. Dalam Peraturan Menteri tersebut bahwa pengaturan impor beras harus dikendalikan dan impor dibutuhkan untuk keperluan tertentu serta sebagai bahan cadangan yang sewaktu-waktu diperlukan oleh negara serta pendistribusian pangan harus tepat sasaran sampai ke tingkat rumah tangga di pelosok pedesaan agar kebutuhan pangan tercukupi.

B. Saran

Saran dari penulis terhadap pemerintah dalam menyikapi liberalisasi pangan yang membawa dampak bagi ketahanan pangan masyarakat adalah :

- a) Membangun kedaulatan pangan bagi masyarakat Indonesia
- b) Melindungi sektor-sektor pertanian domestik khususnya pengadaan tanah hingga dapat menghasilkan pangan secara mandiri guna mewujudkan swasembada beras
- c) Melindungi pasar dalam negeri dari masuknya pangan impor murah
- d) Menjamin kualitas pangan yang diinginkan oleh rakyat
- e) Mengatur produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri untuk mengatasi surplus produksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adolf, Huala, 2002, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arifin Bustanul, 2004, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Devine, Pat, 1995., *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi.*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
- Fuady Munir, 2004, *Hukum Dagang Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M, Martosoewigono, R Sri Soemantri, *et all*, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hata, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT & WTO; Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- I. Wibowo dan Francis Wahono, ed 2003, *Neoliberalisme*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta
- John Madeley, 2005, *Loba Keranjingan Berdagang Kaum Miskin Tumbal Perdagangan Bebas*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta
- Kartajoemana, H.S, 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta
- Khudori, 2004, *Neoliberalisme Menumpas Petani Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*, Resist Book, Yogyakarta.
- Setiawan, Bonnie, 2003, *Globalisasi Pertanian*, 2003, Institut for Global Justice, Jakarta

Soedijana, FX, Yohanes, Triyana, *et al*, 2008, *Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Makalah :

DR. Ir. Hermanto, MS., 2010 *Kebijakan Ketahanan Pangan Berkelanjutan*, Makalah ini disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Kalimantan Barat 2010 di Hotel Mercure Pontianak. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Marsono, Y, 2010, *Dari Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Atas Pangan*, makalah dalam diskusi PSHD UAJY

Laporan Hasil Penelitian :

Yohanes Triyana, 2007, *Laporan Penelitian Kebijakan Pemerintah Tentang Liberalisasi Jasa Pendidikan Berdasarkan GATS dan Penerapannya Terhadap Pendidikan Tinggi di Propinsi DIY*, FH UAJY, Yogyakarta

Website :

<http://www.scribd.com/doc>, World-Trade-Organization-WTO, 13 April 2010

www.kontras.org/baru/DeklarasiUniversalHAM.pdf, 23 April 2010

www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Konvensi_Ekosob.pdf , 23 April 2010

<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm> 14 April 2010

<http://agribisnis.deptan.go.id/web/pustaka/Perjanjian>, 14 April 2010

[http://www.scribd.com/doc, World-Trade-Organization-WTO](http://www.scribd.com/doc/World-Trade-Organization-WTO), 13 April 2010

Effendy, Sofyan, GATS dan *Liberalisasi Pendidikan Tinggi*, dalam situs

www.google.com, tanggal 5 Maret 2010

Kamus :

Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1990, PT Cipta Adi Pustaka , Jakarta

B.N, Marbun 2003, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Non Publikasi :

Merry Kaban, *Dampak Liberalisasi Jasa Pendidikan Berdasarkan General*

Agreement On Trade In Services (GATS) Terhadap Pelaksanaan

Kewajiban Pemerintah Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Nasional

Bagi Seluruh Warga Negara Indonesia, Usulan Penelitian Hukum

UAJY,2008

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual

dan Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri